



KEBIJAKAN PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

**Maura Linda Sitanggang
Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan**

**Disampaikan Pada
Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian 2014
Bandung, 3 Juni 2014**

Sistematika

PENDAHULUAN

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAYANAN
KEFARMASIAN**

CAPAIAN KINERJA YANFAR

PERAN PELAYANAN KEFARMASIAN DALAM JKN

TANTANGAN

PENUTUP

PENDAHULUAN

SISTEM KESEHATAN NASIONAL



KEBIJAKAN OBAT NASIONAL

Pelayanan Kesehatan bagi
Peserta Jaminan Kesehatan



KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

UU No. 36/2009 Kesehatan

Ps 36: Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial

UU No. 40/2004 SJSN

Ps 25: Daftar dan harga obat yang dijamin BPJS, ditetapkan oleh Pemerintah

Perpres No. 111/2013

Ps 32: Pelayanan obat alkes dan BMHP untuk peserta Jamkes berpedoman pada daftar dan harga obat, alkes dan BMHP yang ditetapkan oleh Menteri

Daftar obat, alkes dan BMHP dituangkan dalam Fornas dan Kompendium Alkes

SK Menkes 189/2006 Kebijakan Obat Nasional

KETERSEDIAAN
KETERJANGKAUAN

JAMINAN
KEAMANAN, MUTU
& MANFAAT

POR

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEFARMASIAN DAN ALKES

KEBIJAKAN

Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan dan kualitas Farmasi dan Alkes

STRATEGI

Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat generik

Peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh provider dan konsumen

Penguatan kapasitas institusi dalam manajemen suplai chain obat dan teknologi

Peningkatan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana sediaan farmasi dan alkes

Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan obat tradisional Indonesia

Peningkatan pelayanan kefarmasian

Peningkatan pengendalian dan monitoring dan evaluasi harga obat

Penguatan pengawasan premarket dan post market alkes dan PKRT

Peningkatan Ketersediaan, Kualitas Kefarmasian dan Alkes

REGULASI DAN PEDOMAN PENDUKUNG UNTUK PELAKSANAAN YANFAR

1. UU No. 40 Tahun 2004: ***Sistem Jaminan Sosial Nasional***
2. UU No. 35 Tahun 2009: ***Narkotika***
3. UU No. 36 Tahun 2009: ***Kesehatan***
4. UU No. 24 Tahun 2011: ***Badan Penyelenggara Jaminan Sosial***
5. PP No. 72 Tahun 1998: ***Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan***
6. PP No. 51 Tahun 2009: ***Pekerjaan Kefarmasian***
7. Perpres No. 72 Tahun 2012: ***Sistem Kesehatan Nasional***
8. Perpres No. 12 Tahun 2013: ***Jaminan Kesehatan***
9. SK Menkes No. 186 Tahun 2006: ***Kebijakan Obat Nasional***
10. SK Menkes No. 32 Tahun 2013: ***Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014***
11. Permenkes No. 889 Th. 2011: ***Registrasi Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga kefarmasian***
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1197/Menkes/SK/X/2004: ***Standar Pelayanan Farmasi di RS***
(revisi)
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1027/Menkes/SK/IX/2004: ***Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*** (revisi)
14. SK Menkes No. HK.02.02/MENKES/068/2010: ***Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah***

ISU STRATEGIS BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN

Belum optimalnya Pelayanan Kefarmasian yg **efektif** dan **efisien**, termasuk POR sebagai salah satu pilar Pelayanan Kefarmasian untuk mencapai MDGs



STRATEGI

Peningkatan pelayanan kefarmasian

MENINGKATKAN PENGGUNAAN OBAT RASIONAL (POR)

1. Evaluasi, revisi dan implementasi pedoman penggunaan obat rasional, utamanya untuk obat program
2. Penggerakan penggunaan obat rasional dlm rangka efisiensi dan efektifitas biaya pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

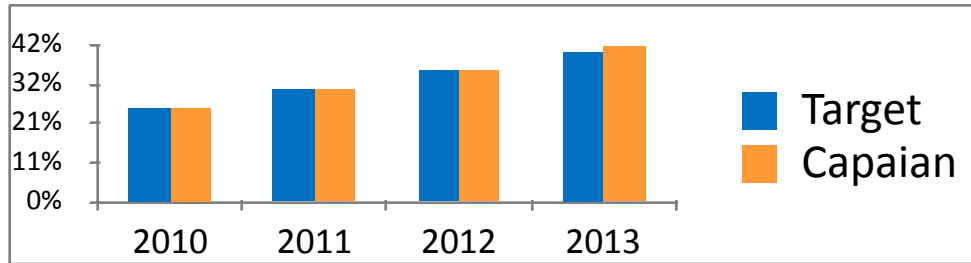
MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS

1. Revitalisasi pelaksanaan pelayanan farmasi klinik di RS dan komunitas
2. Menempatkan dan meningkatkan peran Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian di RS dan Puskesmas

CAPAIAN KINERJA PELAYANAN KEFARMASIAN

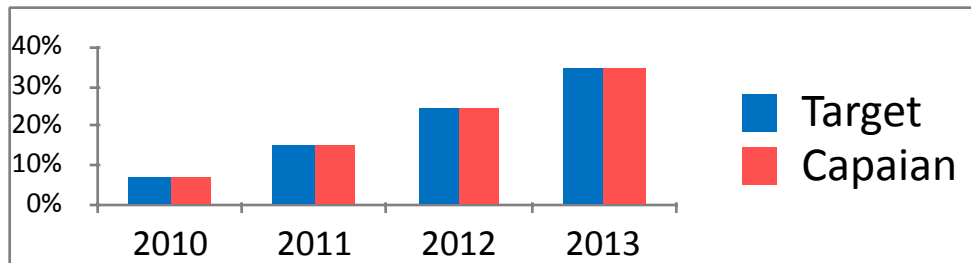


CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2010-2013



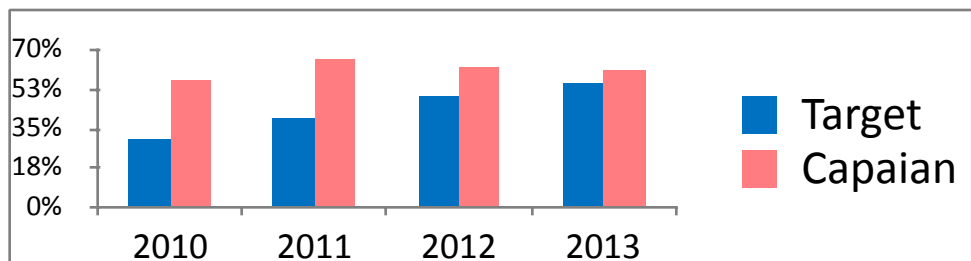
Persentase Rumah Sakit Pemerintah yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Target 2014: 45%



Persentase Puskesmas Pemerintah yg melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

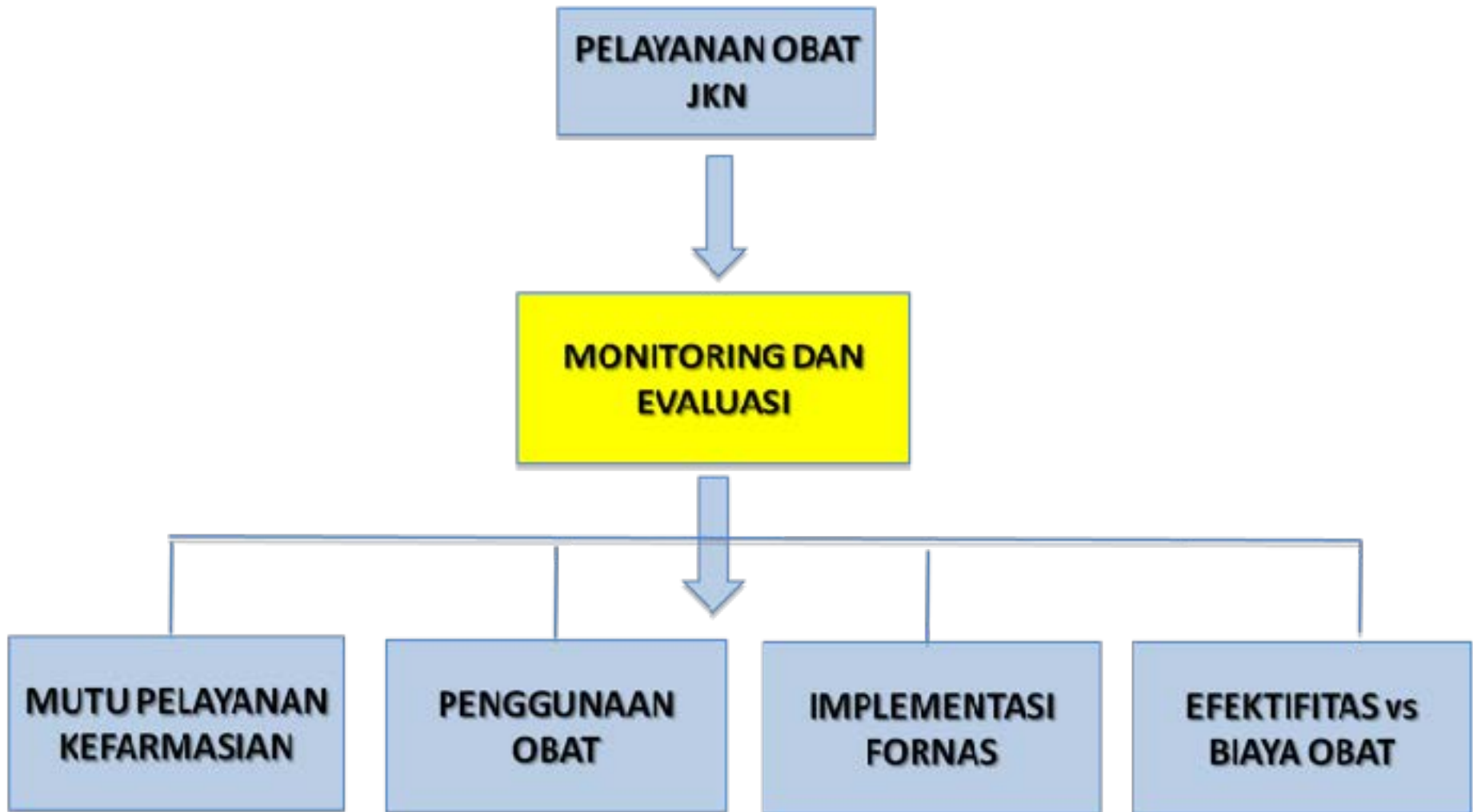
Target 2014: 39,79%



Persentase POR di Sarana Pelayanan Dasar Pemerintah

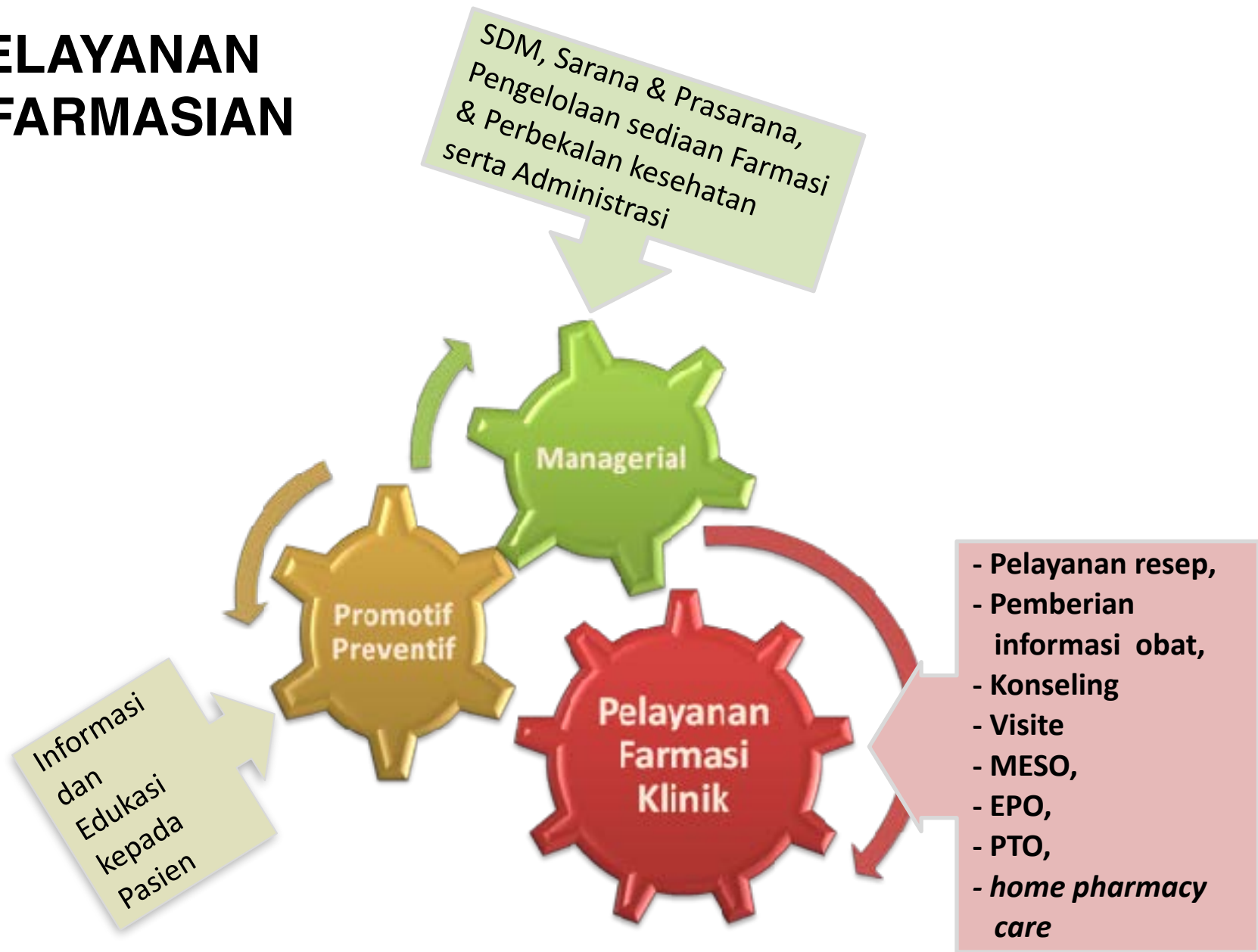
Target 2014: 60%

Pelayanan Obat Dalam JKN



STRATEGI PENINGKATAN PROGRAM PELAYANAN KEFARMASIAN

PELAYANAN KEFARMASIAN



PERAN TENAGA KEFARMASIAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

- PENGELOLAAN SARANA & PRASARANA SESUAI STANDAR

- PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI DAN PERBEKES SESUAI PERENCANAAN KEBUTUHAN

- ADMINISTRASI TERKAIT PENGELOLAAN & PELAYANAN FARMASI KLINIK

- RUTIN MELAKUKAN EVALUASI DAN DITINDAKLANJUTI

MANAJERIAL

PELAYANAN FARKLIN

- PELAYANAN & PENGKAJIAN RESEP DILAKUKAN SESUAI SOP, TERMASUK PASIEN RUJUK BALIK
- **PEMBERIAN INFORMASI OBAT**, KONSELING, VISITE DAN PEMANTAUAN TERAPI OBAT DILAKUKAN SESUAI STANDAR DAN DIDOKUMENTASIKAN
- *HOME PHARMACY CARE* DILAKUKAN UNTUK PASIEN AGAR MENINGKATKAN KEPATUHAN & MENCEGAH RESISTENSI OBAT

- INFORMASI DAN EDUKASI KEPADA PASIEN/ MASYARAKAT DILAKUKAN MELALUI
 - PENYULUHAN
 - PENYEBARAN INFORMASI SEPERTI LEAFLET, NEWSLETTER, S PANDUK, DAN POSTER

PROMOTIF & PREVENTIF

Apoteker berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan obat yang rasional dengan harga yang terjangkau

DAMPAK PENINGKATAN PELAYANAN KEFARMASIAN TERHADAP MUTU PELAYANAN KESEHATAN

**Intervensi
Peningkatan
Pelayanan
Kefarmasian
di Fasilitas
Kesehatan**

- 1. Meningkatkan Kepatuhan Terapi**
- 2. Mengurangi Kesalahan Penggunaan Obat**
- 3. Mencegah Medication Error**
- 4. Mencegah, Mengatasi, Mengurangi terjadinya Masalah Terkait obat**
- 5. Meningkatkan penggunaan obat yang cost effective**

KEGIATAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN

Identifikasi kebutuhan SDM Kefarmasian di PKM dan RS

Percepatan peningkatan mutu yanfar di PKM Perawatan

Workshop Peran apoteker dalam Akreditasi RS versi 2012

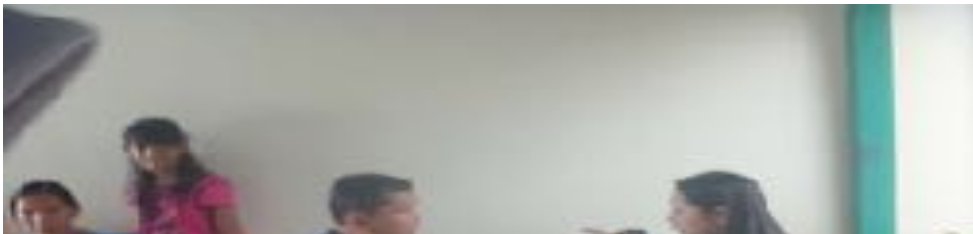
Sertifikasi dan Akreditasi Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peningkatan kemampuan SDM IFRS di Rumah Sakit 3 Regional

Advokasi stakeholder terkait peran SDM kefarmasian

Penyusunan/ Revisi:

- Standar di RS, Puskesmas & Apotek
- Pedoman PIO,



Kolaborasi Tenaga Kesehatan di RS



Penanganan pasien oleh tim multidisiplin mencegah kejadian medication eror, DRP dan mendorong penggunaan obat yang *cost effective*



Patient safety
Quality of life

**PERAN PELAYANAN KEFARMASIAN
DALAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL**

Penggunaan Obat Rasional

POR bertujuan untuk menjamin bhw masyarakat memperoleh obat yg aman, bermutu dan efektif dgn biaya yg terjangkau (*safety, efficacy, quality, economic*)

Pemerintah melakukan upaya peningkatan POR melalui:

- ✓ Penetapan DOEN dan Formularium Nasional yg memuat daftar obat yang dapat digunakan dan dijamin oleh BPJS
- ✓ Pedoman penggunaan obat berbasis bukti ilmiah (*EBM*)
- ✓ Monev peresepan dan kepatuhan terhadap ForNas
- ✓ Advokasi, sosialisasi dan promosi penggunaan obat generik dan penggunaan antibiotik secara rasional
- ✓ Peningkatan mutu pelayanan kefarmasian melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM (apoteker)
- ✓ Penerapan farmasi klinik dalam pelayanan yang sesuai standar
- ✓ Pemberdayaan masyarakat dalam POR



PELAYANAN KEFARMASIAN

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)

- **Pemanfaatan sistem** pengelolaan obat yang sudah ada di tingkat Kab/kota bagi Puskesmas (sarana, SDM, manajemen pengelolaan dan pengadaan obat)
- **Akses** terhadap penyedia obat **terjamin**
- **Pelayanan Kefarmasian** dilaksanakan **sesuai standar** dan pedoman **oleh tenaga kefarmasian**
- **Pengelolaan dan pelayanan** obat di dilaksanakan oleh **apoteker** yang memiliki **kompetensi dan kewenangan**
- **Pelayanan obat di Praktek dr/drgr** dilakukan / **Apotek** yang masuk dalam jejaring fasyankes



FASILITAS KESEHATAN TINGKAT LANJUT (FKTL)

- Pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh IFRS melalui sistem satu pintu
- Harus melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
- Pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh Apoteker
- Pengelolaan dan pelayanan obat di dilaksanakan oleh apoteker yang memiliki kompetensi dan kewenangan
- Pelayanan obat di Praktek dr/drg/ dr.Spesialis dilakukan oleh Apotek yang masuk dalam jejaring fasyankes



TANTANGAN

Perubahan pada sistem pelayanan kesehatan dalam era JKN memerlukan perubahan paradigma apoteker untuk meningkatkan kompetensi di bidangnya masing-masing

Tersedianya tenaga kefarmasian dalam kuantitas dan kualitas yang memadai di fasyankes pemerintah / swasta untuk mendukung tercapainya pelayanan kefarmasian yang bermutu

Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi program pelayanan kefarmasian yang efektif termasuk penggunaan obat rasional sebagai salah satu pilar pelayanan kesehatan

Penutup

Untuk menjamin mutu dan keberhasilan program pelayanan kefarmasian harus didukung tersedianya **data yang valid sebagai bukti** hasil kinerja program

Mutu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh **mutu pelayanan kefarmasian**

rangka peningkatan mutu pelayanan kefarmasian yang optimal dan sesuai standar dan menjamin ketersediaan data Nasional perlu **kerjasama dan dukungan dari seluruh tenaga kesehatan** di fasyankes dan dinas kesehatan seluruh Indonesia



terima